



# ANALISIS KRITIS TERHADAP ISU DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA SEKOLAH DASAR DI INDONESIA

**Ahmad Irfan<sup>1</sup>, Radeni Sukma Indra Dewi<sup>2</sup>, Intan Sari Rufiana<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Pendidikan Dasar, Sekolah Pascasarjana

Universitas Negeri Malang

E-mail: ahmad.irfan.2521038@students.um.ac.id . No. HP 085608081500

**Abstract:** This study aims to critically analyze the issues and challenges of implementing the Merdeka Curriculum at the elementary school level in Indonesia, with a scope that includes identifying the main themes of the challenges, their manifestations in planning, implementation, and assessment, the underlying systemic factors, and recommendations for solutions. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) with the PRISMA protocol, analyzing 18 selected articles from the results of screening scientific databases from 2020 to 2025. The results of the study reveal five main themes of challenges: limited teacher competence, administrative burden, infrastructure and resource gaps, the complexity of the assessment system, and the contextual dynamics of students and parental support. These issues showed up as difficulties in creating lesson plans, putting project-based learning and differentiation into practice, and carrying out real assessments. These issues were made worse by systemic factors like inadequate teacher development models, infrastructure inequalities, and policies that were not contextually relevant. The study's conclusion highlights the necessity of systemic interventions for successful implementation, including the institutionalization of participatory feedback mechanisms, equitable resource distribution, strengthened instructional leadership, and ongoing teacher development transformation.

**Keywords:** Merdeka Curriculum; Elementary School; implementation challenges; systematic literature review; education policy

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis isu dan tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat Sekolah Dasar di Indonesia, dengan ruang lingkup mencakup identifikasi tema utama tantangan, manifestasinya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, faktor-faktor sistemik yang mendasarinya, serta rekomendasi solutif. Metode yang digunakan adalah *Systematic Literature Review (SLR)* dengan protokol PRISMA, menganalisis 18 artikel terpilih dari hasil penyaringan database ilmiah periode 2020-2025. Hasil penelitian mengungkap lima tema tantangan utama: keterbatasan kompetensi guru, beban administratif, kesenjangan infrastruktur dan sumber daya, kompleksitas sistem penilaian, serta dinamika kontekstual peserta didik dan dukungan orang tua. Tantangan tersebut termanifestasi dalam kesulitan penyusunan modul ajar, penerapan pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi, serta pelaksanaan asesmen autentik, yang diperparah oleh faktor sistemik seperti kebijakan yang kurang kontekstual, disparitas infrastruktur, dan model pengembangan guru yang belum efektif. Simpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi memerlukan intervensi sistemik berupa transformasi pengembangan guru yang berkelanjutan, pemerataan sumber daya berbasis keadilan, penguatan kepemimpinan instruksional, dan institutionalisasi mekanisme umpan balik partisipatif.

**Kata kunci:** Kurikulum Merdeka; Sekolah Dasar; tantangan implementasi; *systematic literature review*; kebijakan pendidikan

## PENDAHULUAN

Dalam konteks pendidikan, kurikulum berperan sebagai fondasi utama yang menetapkan arah, materi, dan kualitas proses pembelajaran (Sabriadi & Wakia, 2024). Kerangka ini tidak hanya menjadi standar bagi para pendidik dalam melaksanakan pengajaran, tetapi juga menjadi kompas bagi peserta didik dalam menempuh perjalanan belajarnya. Kurikulum, yang merupakan inti dari sistem pendidikan, hendaknya terus berubah dan beradaptasi terhadap tataran sosial masyarakat, teknologi, dan ekonomi yang berubah dengan cepat dan dinamis. Dari Kurikulum 2013 (K13) hingga yang terbaru, yakni Kurikulum Merdeka, perubahan kurikulum telah menjadi hal yang rutin terjadi di Indonesia. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan tuntutan zaman (Marzuqi & Ahid, 2023).

Kurikulum Merdeka, yang diusung sebagai bagian dari program Merdeka Belajar, hadir dengan tujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada satuan pendidikan dalam menentukan capaian visi, misi, dan tujuan sekolah. Konsep ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada murid (*student-centered*), *project based learning (PjBL)*, dan fleksibilitas bagi guru untuk mengembangkan materi sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik (Inayati, 2022; Rahayu et al., 2022). Secara filosofis, kurikulum ini bertujuan untuk memulihkan pembelajaran pasca pandemi dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, dinamis, dan relevan.

Namun, celah antara kebijakan dan praktik di lapangan seringkali terasa cukup lebar. Studi-studi empiris terbaru mengungkapkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat Sekolah Dasar (SD) tidak terlepas dari sejumlah tantangan dan isu kritis. Penelitian oleh Ariesanti, Mudiono, dan Arifin (2023) dan Purwulan (2024) mengidentifikasi bahwa guru menghadapi kesulitan substantif dalam menyusun modul ajar, melakukan asesmen diagnostik, dan merancang penilaian sumatif. Kesulitan ini tidak hanya berakar pada pemahaman konseptual yang belum utuh terhadap struktur Kurikulum Merdeka, tetapi juga pada beban administratif baru yang ditimbulkannya. Akibatnya, efektivitas implementasi kurikulum di lapangan menjadi terhambat karena energi guru banyak tersita untuk menyelesaikan tantangan teknis operasional. Di samping itu, pemahaman guru terhadap konsep dan struktur kurikulum baru ini masih perlu ditingkatkan, terutama bagi guru senior yang kurang terampil dalam memanfaatkan teknologi (Syukri et al., 2025).

Tantangan lain yang bersifat sistemik juga muncul, seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya sumber daya pendukung, seperti media belajar yang relevan, dan beban administratif guru yang tinggi (Alwi & Achadi, 2024; Purwulan, 2024). Kondisi ini tidak hanya menghambat

kreativitas guru dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif, tetapi juga berpotensi mengurangi waktu interaksi edukatif yang seharusnya dapat difokuskan untuk memantau perkembangan peserta didik. Problematika ini semakin kompleks dengan keragaman konteks geografis dan sosio-ekonomi di Indonesia. Hal ini menyebabkan implementasi kurikulum tidak merata dan seringkali tidak optimal dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis yang mendalam dan sistematis untuk memetakan isu-isu implementasi kurikulum SD secara umum, serta mengkritisi tantangan spesifik dalam penerapan Kurikulum Merdeka. *Systematic Literature Review (SLR)* ini hadir untuk mengkonsolidasikan temuan-temuan empiris dari berbagai studi terkini, guna memberikan gambaran yang komprehensif dan *evidence-based* mengenai realitas implementasi kurikulum di Indonesia.

Penelitian terdahulu mengenai implementasi Kurikulum Merdeka sebagian besar bersifat partikular, seperti studi kasus di lokasi tertentu (Ariesanti, Mudiono, & Arifin, 2023) atau survei persepsi guru dengan cakupan terbatas (Purwulan, 2024). Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran yang berharga namun bersifat partikular. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggunakan *Systematic Literature Review (SLR)* untuk secara komprehensif memetakan, menganalisis, dan mensintesis temuan-temuan empiris dari berbagai sumber di Indonesia. Melalui metodologi ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi daftar tantangan, tetapi juga mengekspos pola, temuan yang saling bertentangan, dan celah penelitian yang belum terjawab. Lebih dari itu, dengan memfokuskan analisis secara spesifik pada tingkat Sekolah Dasar, penelitian ini menawarkan kedalaman pemahaman mengenai tantangan unik yang dihadapi pada tahap pendidikan fundamental, yang seringkali memiliki karakteristik berbeda dengan jenjang pendidikan menengah.

Urgensi penelitian ini didorong oleh tiga faktor utama. Pertama, Kurikulum Merdeka saat ini berada pada fase implementasi kritis yang bersifat masif. Kebijakan ini telah bertransisi dari program percontohan menjadi penerapan secara nasional (Kemendikbudristek, 2023). Pada titik ini, sebuah evaluasi yang komprehensif berbasis bukti empiris menjadi sangat penting untuk memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Kegagalan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan sejak dini dapat berisiko menghambat pencapaian tujuan utama kurikulum, yaitu pemulihan pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan pasca-pandemi.

Kedua, terdapat potensi disparitas hasil pembelajaran yang semakin lebar jika tantangan implementasi tidak diatasi secara merata. Sekolah-sekolah di daerah terpencil dan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) cenderung menghadapi hambatan yang jauh lebih kompleks. Penelitian ini mendesak untuk menjadi landasan bagi formulasi kebijakan yang lebih berkeadilan sosial dan kontekstual, memastikan tidak ada satuan pendidikan yang tertinggal dalam transformasi ini.

Ketiga, urgensi ini juga terkait dengan kesejahteraan dan kapasitas guru. Beban administratif dan tantangan teknis yang terus berlanjut tanpa solusi sistemik dapat menyebabkan kelelahan profesional (*burnout*) dan menurunkan motivasi guru, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada interaksi pembelajaran di kelas (Alwi & Achadi, 2024). Oleh karena itu, sebuah analisis yang sistematis sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi akar masalah dan memberikan rekomendasi yang solutif bagi para pemangku kepentingan.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi yang telah dipaparkan, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut: (1) Apa saja tema utama isu dan tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat Sekolah Dasar di Indonesia yang secara konsisten dilaporkan dalam kajian ilmiah terkini? (2) Bagaimana tantangan-tantangan tersebut memanifestasikan diri dalam aspek perencanaan pembelajaran (penyusunan modul ajar), pelaksanaan (penerapan model pembelajaran), dan penilaian (asesmen diagnostik dan sumatif) di SD? (3) Faktor-faktor sistemik apa (misalnya, kebijakan, infrastruktur, sumber daya, dan pelatihan) yang diidentifikasi sebagai penyebab utama atau penguat dari berbagai tantangan implementasi tersebut? (4) Apa saja rekomendasi atau strategi solutif yang telah diusulkan dalam literatur untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dan bagaimana implikasinya bagi kebijakan dan praktik pendidikan di masa depan?

## **METODE**

Studi ini menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)* untuk menganalisis secara kritis isu dan tantangan implementasi Kurikulum Merdeka jenjang Sekolah Dasar di untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis seluruh temuan penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan (Xiao & Watson, 2019). Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif, objektif, dan berbasis bukti (*evidence-based*) dengan mengkonsolidasikan temuan dari berbagai kajian empiris sebelumnya (Kitchenham & Charters, 2007).

### **Desain dan Alur Penelitian**

Untuk memastikan ketelitian dan transparansi dalam proses peninjauan, penelitian ini mengadopsi alur *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)*. Protokol PRISMA menyediakan kerangka kerja standar yang meliputi tahapan identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi, sehingga meminimalisasi bias dan meningkatkan akurasi

sintesis literatur (Page et al., 2021). Alur PRISMA dipandang efektif dalam bidang ilmu sosial dan pendidikan untuk melakukan pemetaan literatur yang terstruktur (Güzel et al., 2024).

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data literatur dilakukan melalui empat tahap utama sesuai diagram PRISMA yang dapat diuraikan sebagai berikut.

#### ***Tahap Identifikasi (Identification)***

Tahap ini diawali dengan perumusan string pencarian kata kunci berdasarkan pertanyaan penelitian. Pencarian dilakukan pada *database* ilmiah terindeks *Google Scholar* (dengan bantuan *Publish or Perish*), mengingat banyak kajian tentang Kurikulum Merdeka diterbitkan di jurnal nasional. Kata kunci yang digunakan adalah: ("Kurikulum Merdeka" OR "Merdeka Curriculum") AND ("Sekolah Dasar" OR "SD" OR "primary school") AND ("implementasi" OR "tantangan" OR "isu") AND Indonesia. Pencarian dibatasi pada rentang tahun 2020 s.d. 2025 untuk memastikan kebaruan dan relevansi data dengan konteks implementasi Kurikulum Merdeka yang masih berlangsung. Hasil awal dari proses identifikasi ini mengumpulkan 100 dokumen yang potensial.

#### ***Tahap Penyaringan (Screening)***

Pada tahap ini, semua dokumen yang diperoleh disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi: (1) dokumen berupa artikel jurnal penelitian empiris atau kualitatif; (2) fokus studi pada implementasi Kurikulum Merdeka di SD/MI di Indonesia; (3) membahas tantangan, kendala, atau isu implementasi; dan (4) diterbitkan dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Sumber seperti buku, prosiding seminar, artikel opini, dan laporan kebijakan tanpa metodologi penelitian yang jelas dieksklusi. Penyaringan berdasarkan judul dan abstrak menghasilkan 43 dokumen yang lolos ke tahap selanjutnya.

#### ***Tahap Kelayakan (Eligibility)***

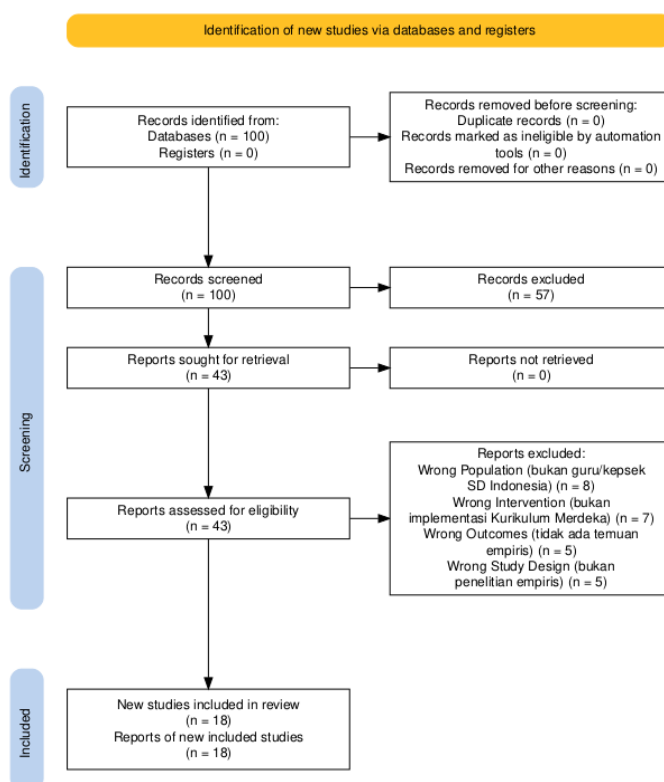
Pada tahap ini, 43 dokumen yang telah lolos penyaringan dinilai secara mendalam berdasarkan keseluruhan teks (*full-text assessment*). Penilaian dilakukan dengan menerapkan kriteria eksklusi yang lebih ketat:

1. *Wrong Population* (n=8): Studi tidak melibatkan guru, kepala sekolah, atau konteks Sekolah Dasar di Indonesia.
2. *Wrong Intervention* (n=7): Fokus studi bukan pada implementasi Kurikulum Merdeka, melainkan program Merdeka Belajar lainnya, atau kurikulum lama (K13).
3. *Wrong Outcomes* (n=5): Artikel tidak menyajikan temuan empiris atau analisis mendalam mengenai tantangan, tetapi lebih bersifat konseptual, editorial, atau laporan kebijakan tanpa data.

4. *Wrong Study Design* (n=5): Dokumen bukan merupakan penelitian empiris (misalnya, tinjauan literatur non-sistematis, prosiding seminar tanpa metodologi jelas, atau artikel opini).

### Tahap Inklusi (Included)

Sebanyak 18 artikel hasil akhir dari tahap kelayakan kemudian dimasukkan ke dalam proses analisis dan sintesis sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Keseluruhan proses seleksi ditampilkan secara visual dalam Diagram PRISMA pada Gambar 1 di bawah ini.



**Gambar 1. Flowchart SLR alur PRISMA**

Diagram ini disusun berdasarkan pedoman *The PRISMA 2020 Statement* (Page et al., 2021).

### Instrumen dan Analisis Data

Instrumen utama penelitian ini adalah protokol penarikan data (*data extraction protocol*) yang dikembangkan dalam bentuk lembar kodifikasi (*coding sheet* menggunakan *Google Spreadsheet*). Lembar ini dirancang untuk mencatat informasi sistematis dari setiap artikel yang diinklusi, meliputi: (1) identitas artikel (penulis, tahun, judul, sumber jurnal); (2) metode dan desain penelitian; (3) konteks lokasi dan karakteristik sampel; (4) temuan utama terkait isu dan tantangan (dikodekan ke dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan faktor sistemik); serta (5) rekomendasi atau implikasi kebijakan yang diusulkan.

Analisis data terhadap 18 artikel terpilih dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, analisis tematik (*thematic analysis*) digunakan untuk mengidentifikasi,

mengelompokkan, dan mengkodekan pola-pola temuan yang berulang dari berbagai literatur menjadi tema-tema utama yang koheren (Braun & Clarke, 2006). Kedua, dilakukan analisis naratif sintesis (*narrative synthesis*) untuk mengintegrasikan temuan dari berbagai studi, menginterpretasi hubungan dan kontradiksi antar-tema, serta merumuskan pemahaman yang komprehensif dan rekomendasi yang berbasis bukti (Popay et al., 2006). Seluruh proses analisis dilakukan secara manual dengan bantuan matriks tematik dalam media *spreadsheet* untuk memastikan kedalaman, akurasi, dan transparansi interpretasi.

## HASIL

Analisis tematik terhadap 18 artikel yang diinklusi menghasilkan pemetaan komprehensif mengenai isu dan tantangan implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat Sekolah Dasar. Temuan penelitian disajikan secara sistematis sesuai dengan keempat pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

### Tema Utama Isu dan Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka

Sintesis literatur mengidentifikasi lima tema utama tantangan yang secara konsisten dilaporkan dalam kajian empiris terkini. Pertama, mayoritas studi (misalnya, Puspitri Mayangsari et al., 2024; Muzharifah et al., 2023; Arjuni & Aristiati, 2024) menyoroti keterbatasan kompetensi dan kesiapan guru. Tantangan utama terletak pada pemahaman konseptual yang belum utuh terhadap filosofi dan struktur Kurikulum Merdeka, yang diperparah oleh kesulitan teknis dalam menyusun modul ajar dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Selain itu, rendahnya literasi digital dan pedagogis juga menjadi hambatan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis proyek.

Kedua, muncul beban administratif dan kerumitan perencanaan yang signifikan. Banyak penelitian (seperti Kasmawati et al., 2025; Ariyanti et al., n.d.) mengungkap bahwa energi guru banyak tersita untuk menyelesaikan tugas administratif baru, seperti penyusunan modul ajar yang detail dan laporan proyek. Akibatnya, fokus guru terhadap interaksi pembelajaran langsung bersama siswa di kelas menjadi berkurang.

Ketiga, terdapat kesenjangan infrastruktur dan sumber daya pendukung yang signifikan. Disparitas ketersediaan sarana dan prasarana, terutama teknologi dan alat peraga, antara sekolah di pusat kota dan daerah terpencil/3T menjadi temuan yang menonjol (Dewi et al., 2025; Hasballah dan Zulfatmi, 2024; Ruliandari et al., 2025). Keterbatasan ini secara langsung menghambat pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek (PjBL/P5) dan integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar.

Keempat, guru menghadapi kompleksitas sistem penilaian dalam kurikulum baru ini. Kesulitan dalam merancang dan melaksanakan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif yang autentik serta sesuai capaian kompetensi dilaporkan secara luas (Sucipto et al., 2024; Puspitri Mayangsari et al., 2024). Kebingungan khususnya muncul dalam mengevaluasi proses dan produk proyek secara komprehensif.

Kelima, dinamika kontekstual peserta didik dan dukungan orang tua turut menjadi tantangan. Beberapa studi (Marwiyah et al., 2024; Israwati Amir et al., 2022; Arjuni & Aristiati, 2024) mengemukakan bahwa heterogenitas karakteristik siswa seperti minat, kemampuan, dan gaya belajar serta rendahnya keterlibatan dan dukungan orang tua dalam proses pembelajaran di rumah, menambah tingkat kesulitan dalam implementasi kurikulum.

### **Manifestasi Tantangan pada Aspek Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penilaian**

Tantangan-tantangan yang teridentifikasi dalam tema besar menemukan ekspresi konkret dan berdampak langsung dalam siklus operasional pembelajaran. Pada aspek perencanaan, hambatan utama terkonsentrasi pada fase desain instruksional. Guru mengalami kesulitan substantif dalam melakukan backward design, yaitu proses mentransformasikan Capaian Pembelajaran (CP) menjadi Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan selanjutnya merancang Modul Ajar yang koheren, kontekstual, dan sesuai dengan prinsip diferensiasi (Muzharifah et al., 2023; Puspitri Mayangsari et al., 2024). Kompleksitas teknis ini berakibat pada rendahnya kesesuaian produk perencanaan, sebagaimana diindikasikan oleh temuan satu studi yang menunjukkan hanya 44,1% Modul Ajar yang memenuhi kriteria Kurikulum Merdeka (Muzharifah et al., 2023). Beban kognitif dan administratif dalam penyusunan dokumen-dokumen ini seringkali tidak diimbangi dengan alokasi waktu yang memadai dan panduan teknis yang operasional, sehingga berpotensi menggeser fokus dari esensi pembelajaran ke pemenuhan administratif semata.

Pada aspek pelaksanaan, tantangan bergeser dari ranah desain ke ranah eksekusi dan fasilitasi di kelas. Manifestasi utama terletak pada kesulitan guru dalam mengoperasionalkan model pembelajaran inovatif yang diamanatkan, khususnya pembelajaran berbasis proyek (PjBL/P5) dan pembelajaran berdiferensiasi. Guru menghadapi kendala dalam merancang proyek yang autentik, bermakna, dan terintegrasi dengan lingkungan belajar, serta kesulitan dalam mengelola kelas yang heterogen untuk memfasilitasi kebutuhan individual siswa (Marwiyah et al., 2024; Erhy Ragil Nazar et al., 2024). Kendala ini semakin diperparah oleh keterbatasan sumber daya pendukung, seperti alat peraga dan akses teknologi, yang menghambat terciptanya pengalaman belajar yang interaktif dan eksploratif (Ruliandari et al., 2025). Akibatnya, potensi

kurikulum untuk menciptakan pembelajaran yang mendalam dan berpusat pada siswa seringkali belum teraktualisasi secara optimal di ruang kelas.

Sementara itu, pada aspek penilaian, guru dihadapkan pada ambiguitas dan kompleksitas dalam menerapkan sistem asesmen baru. Kesulitan muncul dalam merancang dan melaksanakan asesmen diagnostik yang akurat untuk memetakan learning gap dan kebutuhan awal siswa, yang merupakan fondasi penting bagi pembelajaran yang responsif (Puspitri Mayangsari et al., 2024). Di sisi lain, penilaian sumatif, khususnya untuk mengevaluasi capaian kompetensi melalui produk proyek dan portofolio, dinilai rumit karena membutuhkan pengembangan rubrik multidimensi dan proses penilaian yang berkelanjutan. Transisi dari paradigma penilaian berbasis konten menuju penilaian berbasis kompetensi ini menuntut keterampilan baru yang belum sepenuhnya dikuasai oleh banyak guru, sehingga berpotensi menyebabkan reduksi penilaian menjadi sekadar tugas administratif tambahan yang kurang bermakna bagi proses belajar siswa.

### **Analisis Faktor Sistemik sebagai Determinan Struktural**

Analisis mendalam mengungkap bahwa akar permasalahan implementasi Kurikulum Merdeka bersifat sistemik dan struktural, melampaui kapasitas individu guru. Pada tataran kebijakan dan koordinasi, ditemukan bahwa sosialisasi dan diseminasi regulasi sering kali bersifat masif namun kurang mendalam, serta belum didukung oleh panduan teknis yang operasional dan kontekstual (Adha & Fadhila, 2023; Angga et al., 2022). Kondisi ini menyebabkan variasi interpretasi dan praktik implementasi yang sangat lebar antarsekolah. Lebih lanjut, kerangka kebijakan yang sentralistik terkadang kurang responsif terhadap keragaman konteks sosio-geografis Indonesia, sementara koordinasi antarlevel pemerintahan (pusat, daerah, sekolah) dalam pelaksanaannya sering kali belum optimal, menimbulkan tumpang tindih program dan kebingungan di lapangan.

Faktor disparitas infrastrukural dan asimetri alokasi sumber daya merupakan determinan struktural krusial lainnya. Kajian-kajian empiris secara konsisten mengonfirmasi adanya ketimpangan yang signifikan dalam ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), alat peraga sains, serta kelengkapan perpustakaan, antara sekolah di wilayah urban dan daerah tertinggal (Dewi et al., 2025; Hasballah & Zulfatmi, 2024; Ruliandari et al., 2025). Asimetri ini tidak hanya terbatas pada fasilitas fisik, tetapi juga mencakup akses terhadap materi pembelajaran digital dan sumber daya manusia pendukung. Ketimpangan struktural ini berfungsi sebagai *bottleneck* yang memperparah tantangan pedagogis, membatasi kemungkinan penerapan pembelajaran inovatif, dan pada akhirnya berisiko mempertajam kesenjangan kualitas pendidikan secara nasional.

Di sisi pengembangan kapasitas guru, model Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang diterapkan dinilai belum efektif dalam membangun kompetensi yang diperlukan. Pola pelatihan yang masih dominan bersifat *cascade training*, teoritis, satu arah, dan berjangka pendek, gagal dalam membekali guru dengan pemahaman filosofis yang mendalam dan keterampilan reflektif-praktis yang kontekstual (Sucipto et al., 2024; Puspitri Mayangsari et al., 2024). Pendekatan tersebut cenderung mengabaikan kebutuhan nyata guru di lapangan dan tidak menyediakan mekanisme pendampingan (*coaching*) maupun komunitas praktisi yang berkelanjutan pasca pelatihan. Akibatnya, transfer pengetahuan dari pelatihan ke praktik kelas sering kali tidak terjadi secara optimal.

Terakhir, tantangan juga bersumber dari keterbatasan kepemimpinan instruksional dan jejaring kolaborasi. Meskipun peran kepala sekolah sebagai instructional leader diakui sangat menentukan (Adha & Fadhila, 2023; Kasmawati et al., 2025), dalam praktiknya, kapasitas dan waktu mereka untuk memberikan pembinaan pedagogis yang intensif kepada guru sering kali terbatas. Di tingkat eksternal, terlihat lemahnya jejaring kolaborasi yang sistematis antara satuan pendidikan dengan orang tua, komunitas, perguruan tinggi, dan dunia usaha/industri (Israwati Amir et al., 2022; Yansah et al., 2023). Ketiadaan *ecosystem of support* yang kuat ini menyebabkan sekolah, khususnya yang sumber dayanya terbatas, harus menanggung beban transformasi kurikulum secara mandiri, tanpa dukungan sosial dan sumber daya tambahan dari lingkungan sekitarnya.

### **Sintesis Rekomendasi Kebijakan dan Praktik**

Berdasarkan diagnosis komprehensif terhadap tantangan dan akar penyebabnya, literatur yang dikaji merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang saling berkaitan. Rekomendasi pertama berfokus pada transformasi radikal dalam model pengembangan keprofesian guru. Kajian-kajian menekankan perlunya pergeseran paradigma dari pelatihan *ad hoc* yang bersifat teoritis dan satu arah, menuju pendekatan *job embedded professional development* yang berkelanjutan dan kontekstual (Kasmawati et al., 2025; Sri Sugiarto et al., 2022). Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan model pendampingan (*coaching*) dan *lesson study* yang intensif, penguatan Komunitas Belajar Guru (KBG) atau *Professional Learning Community (PLC)* di tingkat gugus atau sekolah sebagai wadah berbagi praktik dan pemecahan masalah kolektif, serta pelatihan berbasis kasus nyata yang relevan dengan tantangan spesifik yang dihadapi guru di kelas.

Rekomendasi kedua ditujukan untuk merasionalisasi beban kerja guru dan mendigitalisasi dukungan administrasi. Untuk mereduksi beban administratif yang membebani, diperlukan penyederhanaan format perencanaan pembelajaran dan standarisasi *template* Modul Ajar yang fleksibel namun terstruktur (Puspitri Mayangsari et al., 2024). Selain itu, optimalisasi *platform*

digital seperti Platform Merdeka Mengajar harus ditingkatkan, tidak hanya sebagai repositori sumber belajar, tetapi juga sebagai alat bantu otomatisasi dalam penyusunan perangkat ajar, pelaporan, dan bahkan asesmen, sehingga efisiensi kerja guru dapat tercapai.

Pada tataran kebijakan makro, rekomendasi ketiga menyerukan penerapan kebijakan afirmatif yang berbasis prinsip keadilan. Pemerintah perlu merancang intervensi yang lebih terfokus dan berbasis data untuk menjamin pemerataan akses terhadap infrastruktur kritis, seperti jaringan internet, perangkat teknologi, dan alat peraga, khususnya bagi satuan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan daerah pinggiran (Dewi et al., 2025; Ruliandari et al., 2025). Pendekatan ini mengakui bahwa kondisi awal yang tidak setara membutuhkan alokasi sumber daya dan dukungan yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang setara.

Rekomendasi keempat menitikberatkan pada penguatan *ecosystem leadership* dan kemitraan strategis multipihak. Kapasitas kepemimpinan instruksional kepala sekolah dan pengawas perlu ditingkatkan agar mereka dapat berfungsi efektif sebagai pembina pedagogis (Adha & Fadhila, 2023; Yansah et al., 2023). Secara bersamaan, perlu dibangun kemitraan yang sistematis dan berjejaring yang melibatkan orang tua, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kemitraan ini bertujuan menciptakan *ecosystem of support* yang dapat menyediakan sumber daya tambahan, keahlian, dan dukungan sosial bagi sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum.

Terakhir, rekomendasi kelima mengusulkan institusionalisasi mekanisme *feedback loop* dan evaluasi kebijakan yang partisipatif. Untuk memastikan kebijakan pendidikan bersifat responsif dan adaptif, diperlukan sistem umpan balik yang terstruktur, rutin, dan berbasis bukti dari lapangan kepada para perumus kebijakan di tingkat pusat dan daerah (Sucipto et al., 2024). Evaluasi kebijakan implementasi kurikulum harus bersifat formatif dan melibatkan para pemangku kepentingan di garis depan (guru, kepala sekolah) sebagai mitra evaluasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mendasar, kontekstual, dan memiliki keberlanjutan yang lebih baik.

Hasil kajian *Systematic Literature Review* menunjukkan Implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat Sekolah Dasar menghadapi tantangan kompleks yang bersumber dari defisit kapasitas guru, beban administratif, dan kesenjangan infrastruktur, yang termanifestasi dalam kesulitan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan intervensi sistemik yang terfokus pada transformasi pengembangan guru yang kontekstual, pemerataan sumber daya berbasis keadilan, serta penguatan kepemimpinan dan kolaborasi untuk mewujudkan esensi kurikulum secara optimal. Hasil analisis ditunjukkan pada tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Analisis Literatur**

Nomor	Nama Penulis (tahun)	Judul Artikel	Temuan
1	Yoshinta Putri,	Evaluasi Kebijakan	Evaluasi dengan model CIPP

Nomor	Nama Penulis (tahun)	Judul Artikel	Temuan
	Mufarrihul Hazin, Y P Ariyanti, Almufi (n.d.)	Kurikulum Merdeka	menunjukkan Kurikulum Merdeka berhasil memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan meningkatkan relevansi pembelajaran. Namun, implementasi masih terkendala oleh keterbatasan sarana prasarana, kompetensi guru, variasi metode mengajar, dan sistem penilaian yang belum optimal. Diperlukan peningkatan sumber daya dan pelatihan guru agar kurikulum dapat memberi manfaat maksimal.
2	Adha, W. A., & Fadhila, S. (2023)	Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka	Studi di SDN Medono 07 menemukan bahwa kepala sekolah memiliki peran kunci sebagai perencana, pelaksana, supervisor, pemimpin, dan sumber informasi dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Tantangan utama meliputi keterbatasan pemahaman guru, heterogenitas siswa, dukungan masyarakat yang kurang, dan regulasi yang belum jelas. Kepemimpinan adaptif dan kolaboratif kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan implementasi.
3	Arjuni, M., & Aristiati, F. (2024)	Kendala-Kendala Implementasi Kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan	Kendala implementasi terjadi di tiga level: lembaga (kurangnya kesiapan guru dan sumber daya), guru (kurang pemahaman, keterbatasan fasilitas, kesulitan penilaian), dan siswa (ketidaksiapan adaptasi, akses belajar terbatas, kurang dukungan orang tua). Dibutuhkan solusi komprehensif untuk mengatasi hambatan multi-level ini.
4	Dewi, M., dkk. (2025)	Tantangan Implementasi Kurikulum Di Era Digital: Kesiapan Guru Dan Infrastruktur	Studi di Palembang menunjukkan tantangan utama implementasi Kurikulum Merdeka era digital adalah kesiapan guru (kompetensi digital rendah, penggunaan teknologi terbatas) dan ketimpangan infrastruktur TIK antara sekolah pusat dan pinggiran. Kepemimpinan kepala sekolah yang progresif menjadi faktor kunci pendukung, sementara literasi digital siswa masih perlu ditingkatkan. Diperlukan pelatihan berkelanjutan, pemerataan akses teknologi, dan kolaborasi lintas sektor.
5	Ruliandari, L., dkk. (2025)	Analisis Tantangan dan Strategi Guru	Tantangan utama implementasi Kurikulum Merdeka dalam

Nomor	Nama Penulis (tahun)	Judul Artikel	Temuan
		dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran IPA di SD	pembelajaran IPA SD meliputi: keterbatasan sarana prasarana (kurang lab, alat peraga), rendahnya literasi sains siswa, kendala adaptasi guru terhadap kurikulum baru, dan kesenjangan akses teknologi. Strategi efektif yang diidentifikasi mencakup pemanfaatan alat peraga sederhana, penerapan pembelajaran berbasis proyek (PjBL), integrasi teknologi/media digital, serta pelatihan dan pengembangan profesional guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogis dan adaptasi kurikulum.
6	Kurniawan, A. T., dkk. (2024)	Pengembangan Pendidikan Anak SD dalam Kurikulum Merdeka	Penelitian kualitatif menemukan bahwa fleksibilitas Kurikulum Merdeka mendorong inovasi guru dan meningkatkan keterlibatan siswa. Pembelajaran berbasis proyek efektif menumbuhkan motivasi dan koneksi materi dengan kehidupan nyata. Integrasi pendidikan karakter berhasil membentuk nilai moral siswa. Tantangan utama meliputi kesiapan guru yang belum optimal, keterbatasan sarana prasarana, dan variasi partisipasi orang tua. Diperlukan dukungan berupa pelatihan guru, peningkatan fasilitas, dan sosialisasi kepada orang tua agar potensi kurikulum dapat tercapai maksimal.
7	Yansah, O., dkk. (2023)	Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Tantangan dan Peluang	Studi fenomenologi di SD Boarding School Al-Anshory Cirebon menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka mampu mengembangkan karakter positif siswa (akhlak mulia, mandiri, bernalar kritis). Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya (buku, teknologi), kurangnya pelatihan guru, waktu pembelajaran terbatas, serta keterlibatan orang tua yang minim. Namun, terdapat peluang melalui dukungan kepemimpinan kepala sekolah yang inovatif, kolaborasi antar pemangku kepentingan (guru, pengawas, masyarakat), dan pemanfaatan teknologi. Keberhasilan implementasi memerlukan sinergi kuat dari semua

Nomor	Nama Penulis (tahun)	Judul Artikel	Temuan
8	Angga, dkk. (2022)	Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar	Implementasi Kurikulum Merdeka dinilai lebih baik dan sesuai dengan kultur pendidikan Indonesia dibandingkan Kurikulum 2013. Hal ini disebabkan karena Kurikulum Merdeka lebih fleksibel, praktis, dan memberikan keleluasaan bagi guru untuk berinovasi, yang berdampak positif pada antusiasme siswa. Sebaliknya, Kurikulum 2013 mengalami kegagalan implementasi di lapangan akibat konsep yang kompleks, kurangnya pelatihan guru, serta keterbatasan sumber daya. Meskipun demikian, implementasi Kurikulum Merdeka masih dihadapkan pada tantangan seperti pandemi dan ketersediaan fasilitas.
9	Hasballah & Zulfatmi (2024)	Implementasi Kurikulum Merdeka: Tantangan, Kebijakan, Dan Dampak Terhadap Pendidikan	Implementasi Kurikulum Merdeka berdampak positif pada kreativitas siswa, namun efektivitasnya terhambat oleh disparitas kesiapan guru dan infrastruktur antara sekolah perkotaan dan daerah terpencil, sehingga menuntut kebijakan yang lebih merata dan berkelanjutan.
10	Kasmawati, dkk. (2025)	Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Optimalisasi Sumberdaya Manusia dalam Implementasi Kurikulum Merdeka	Penelitian mengungkap bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar menghadapi hambatan struktural seperti beban administratif yang tinggi dan keterbatasan teknologi, serta psikologis berupa kesenjangan kompetensi dan resistensi perubahan guru. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan terintegrasi yang tidak hanya berfokus pada pelatihan praktis, tetapi juga pada digitalisasi administrasi, penguatan peran kepala sekolah sebagai pemimpin transformasional, dan membangun komunitas kolaboratif antar guru untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan.
11	Puspitri Mayangsari et al. (2024)	Analisis Permasalahan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar	Penelitian ini mengungkap lima tantangan utama yang dihadapi guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar, yaitu: (1) pemahaman guru tentang kemerdekaan belajar yang masih terbatas, terutama akibat pelatihan daring yang minim

Nomor	Nama Penulis (tahun)	Judul Artikel	Temuan
			<p>ruang diskusi; (2) kebijakan kenaikan kelas seluruh siswa meski kompetensi belum tuntas; (3) materi ajar yang terlalu luas dan tidak berpatokan spesifik; (4) kesulitan menyusun modul ajar dan desain pembelajaran yang sesuai; serta (5) kompleksitas sistem evaluasi yang meliputi asesmen diagnostik, formatif, sumatif, dan pelaporan proyek. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan sistematis melalui pelatihan yang berkelanjutan, kolaborasi antar-guru dalam KKG, pendampingan kepala sekolah, serta pemanfaatan platform digital seperti Platform Merdeka Mengajar guna mendukung peningkatan kompetensi guru dan keberlanjutan pembelajaran.</p>
12	Dimas Teguh Saputra et al. (2024)	Perubahan Paradigma Guru Dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri Bulukantil telah berhasil menggeser paradigma guru dari pendekatan pengajaran konvensional (<i>teacher-centered</i>) menuju peran sebagai fasilitator pembelajaran yang berpusat pada siswa (<i>student-centered</i>). Perubahan tersebut terlihat dari adopsi metode pembelajaran interaktif, diskusi kelompok, serta penekanan pada penilaian formatif dan sumatif. Guru secara aktif terlibat dalam pelatihan dan pengembangan diri untuk memahami filosofi kurikulum baru, didukung oleh kolaborasi yang kuat antara kepala sekolah, guru, dan komite. Meskipun menghadapi tantangan seperti resistensi sebagian guru dan keterbatasan sumber daya, transformasi paradigma ini tercermin dalam dokumen kurikulum, rencana pembelajaran, dan praktik kelas, yang menjadi fondasi keberhasilan implementasi kurikulum secara bertahap dan holistik.</p>
13	Sucipto et al. (2024)	Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Systematic Literature Review	<p>Penelitian ini merupakan tinjauan literatur sistematis yang komprehensif, berhasil mengidentifikasi lima kategori tantangan utama implementasi Kurikulum Merdeka: keterbatasan sarana prasarana, kesenjangan kompetensi guru (khususnya teknologi), kesulitan evaluasi pembelajaran, kondisi</p>

Nomor	Nama Penulis (tahun)	Judul Artikel	Temuan
14	Sri Sugiarto et al. (2022)	Penguatan Growth Mindset Guru dalam Persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka	<p>siswa, orang tua, lingkungan, dan ketimpangan kebijakan pemerintah.</p> <p>Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan pola pikir berkembang (growth mindset) pada guru sekolah dasar sebagai persiapan implementasi Kurikulum Merdeka. Berdasarkan hasil pre-test (rata-rata 69,62) dan post-test (rata-rata 87,85), semua peserta mengalami peningkatan pemahaman tanpa ada yang menurun, dengan uji statistik (Wilcoxon) yang signifikan (<math>p=0,000</math>). Peserta menunjukkan antusiasme dan keaktifan tinggi selama sesi diskusi dan berbagi pengalaman. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan growth mindset efektif dalam mengubah persepsi guru terhadap tantangan kurikulum baru dari "masalah" menjadi "kesempatan untuk berkembang".</p>
15	Erhy Ragil Nazar et al. (2024)	Peluang dan Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar: Sebuah Studi Interview di Sekolah Penggerak dan Mandiri Berubah	<p>Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar Negeri Kota Kendari telah mendorong transformasi pembelajaran yang positif, ditandai dengan meningkatnya antusiasme siswa dan kreativitas guru dalam pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan diferensiasi. Implementasi ini selaras dengan prinsip konstruktivisme dan teori belajar aktif, di mana siswa secara aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan pengalaman guru dalam kemerdekaan belajar, kesenjangan literasi teknologi, serta ketersediaan sarana prasarana dan bahan ajar yang sesuai. Namun, kolaborasi yang kuat antara guru, orang tua, kepala sekolah, dan dukungan aktif dari Dinas Pendidikan melalui pelatihan, bimbingan, dan koordinasi berhasil menjadi faktor penentu dalam mengatasi kendala dan memastikan keberlanjutan implementasi kurikulum ini.</p>
16	Marwiyah et al. (2024)	Permasalahan Implementasi	Penelitian ini mengidentifikasi bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di

Nomor	Nama Penulis (tahun)	Judul Artikel	Temuan
		Kurikulum Merdeka di Kelas V B SDN 34/1 Teratai	<p>kelas VB SDN 34/I Teratai telah dilakukan melalui pengintegrasian 6 Profil Pelajar Pancasila, penerapan media dan teknologi pembelajaran, serta pelaksanaan program P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) setiap Sabtu. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong pembelajaran berpusat pada siswa. Namun, implementasi ini menghadapi tantangan utama berupa karakteristik peserta didik yang sangat beragam dalam hal tingkat pemahaman, minat, dan gaya belajar, sehingga menyulitkan guru dalam menyusun strategi pembelajaran yang sesuai untuk setiap individu. Selain itu, kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar siswa masih terbatas-hanya 2-3 dari 21 siswa yang mampu menangkap materi dengan cepat, sementara sisanya masih memerlukan bimbingan intensif. Partisipasi aktif siswa dalam diskusi atau kerja kelompok juga rendah, dengan mayoritas lebih fokus pada aktivitas individu. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian merekomendasikan tiga solusi utama: penyesuaian dan diferensiasi strategi pembelajaran sesuai kebutuhan individu, penguatan bimbingan intensif bagi siswa yang memerlukan, serta peningkatan pelatihan profesional guru dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pemanfaatan teknologi.</p>
17	Israwati Amir et al. (2022)	Tantangan Implementasi nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Kurikulum Merdeka Belajar	<p>Penelitian ini mengidentifikasi bahwa tantangan utama dalam mengimplementasikan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila dalam pembelajaran Bahasa Indonesia adalah rendahnya minat baca siswa serta kurangnya dukungan dan kepedulian orang tua dalam proses belajar di rumah, yang diperburuk oleh lemahnya komunikasi antara orang tua dan guru. Implementasi nilai-nilai tersebut merujuk pada enam dimensi Profil Pelajar Pancasila-beriman dan berakhlak mulia,</p>

Nomor	Nama Penulis (tahun)	Judul Artikel	Temuan
18	Muzharifah et al. (2023)	Persepsi Guru Terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah Walisongo Kranji 01 Kedungwuni	<p>berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif yang diintegrasikan melalui pengembangan empat kompetensi dasar berbahasa: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian merekomendasikan penggunaan model pedagogi genre, yang terdiri dari tahapan membangun konteks, pemodelan, pembimbingan bersama, dan pemandirian, guna meningkatkan literasi siswa sekaligus memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran.</p> <p>Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di MI Walisongo Kranji 01 dilakukan secara bertahap, dimulai dari kelas 1 dan 4, dengan penekanan pada pembelajaran berbasis proyek dan penguatan Profil Pelajar Pancasila. Namun, guru menghadapi tantangan utama berupa kesiapan yang masih rendah (di bawah 70%) akibat peralihan paradigma dari fokus konten menuju kompetensi, serta kesulitan teknis dalam menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), mengembangkan modul ajar, dan melaksanakan penilaian berbasis kompetensi. Kendala eksternal seperti fasilitas yang terbatas, keragaman latar belakang siswa, dan kurangnya dukungan orang tua turut memperumit implementasi. Persepsi guru terhadap kurikulum ini terbelah: sebagian melihatnya sebagai peluang untuk fleksibilitas dan pembelajaran yang lebih menyenangkan, sementara lainnya bersikap skeptis akibat kurangnya panduan yang jelas dan konsistensi dalam pelaksanaan. Evaluasi modul ajar menunjukkan bahwa hanya 44,1% yang telah sesuai dengan Kurikulum Merdeka, mengindikasikan perlunya pelatihan berkelanjutan dan pendampingan intensif untuk meningkatkan kapasitas guru dalam menerapkan kurikulum ini secara efektif.</p>

Temuan sistematis dari tinjauan literatur ini secara kolektif menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat Sekolah Dasar sangat bergantung pada

kemampuan mengatasi hambatan pada level mikro (kapasitas guru), meso (kultur sekolah), dan makro (kebijakan dan infrastruktur). Oleh karena itu, analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengaitkan pola tantangan ini dengan kerangka teoritis implementasi kebijakan dan pembelajaran profesional, serta mengeksplorasi celah penelitian yang masih perlu diisi untuk mendukung transformasi pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

## PEMBAHASAN

Temuan sistematis dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang Sekolah Dasar merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi dinamika pada level mikro (individu guru), meso (organisasi sekolah), dan makro (kebijakan dan sistem). Pembahasan berikut akan menganalisis temuan tersebut melalui lensa teori implementasi kebijakan, pembelajaran profesional, dan ekologi sistem pendidikan, seraya menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

### Konfigurasi Tantangan Multi Level dan Relevansinya dengan Teori Implementasi Kebijakan

Temuan pertama penelitian ini mengidentifikasi lima tema utama tantangan yang saling beririsan, defisit kapabilitas guru, beban administratif, kesenjangan infrastruktur, kompleksitas penilaian, serta dinamika kontekstual siswa dan orang tua. Konfigurasi multi level ini selaras dengan teori *Street Level Bureaucracy* yang dikemukakan oleh Lipsky (2010). Guru, sebagai birokrat tingkat jalanan (*street-level bureaucrat*), menghadapi tekanan ganda, tuntutan kebijakan baru yang kompleks (Kurikulum Merdeka) dihadapkan pada sumber daya yang terbatas, waktu yang tidak memadai, dan kondisi kerja yang ambigu. Sebagai respons, guru dapat mengembangkan mekanisme *coping* seperti menyederhanakan prosedur, mengadopsi rutinitas baku, atau seperti yang terungkap dalam beberapa studi, mengurangi esensi pembelajaran inovatif menjadi sekadar pemenuhan dokumen administratif (Puspitri Mayangsari et al., 2024; Muzharifah et al., 2023). Fenomena ini menjelaskan mengapa celah (*gap*) antara kebijakan (*policy as intended*) dan praktik (*policy as implemented*) sering kali begitu lebar (Sabatier & Mazmanian, 1979). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak dapat hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi harus dari sejauh mana esensi filosofi kurikulum yakni pembelajaran berpusat pada siswa dapat diwujudkan dalam interaksi pedagogis sehari-hari.

Selanjutnya, disparitas infrastruktur dan kesenjangan kesiapan guru antardaerah yang begitu signifikan (Dewi et al., 2025; Hasballah & Zulfatmi, 2024) memperkuat argumentasi dalam teori implementasi yang menekankan pentingnya kesetaraan kondisi antarsatu pelaksana. Menurut teori Van Meter dan Van Horn (1975), karakteristik institusi dan lingkungan implementasi

merupakan variabel kritis yang mempengaruhi kinerja. Ketimpangan struktural ini menciptakan *uneven playing field*, di mana sekolah dengan sumber daya memadai dapat berlari lebih cepat, sementara sekolah di daerah 3T justru terjebak dalam siklus keterbatasan. Hal ini berimplikasi pada urgensi pendekatan kebijakan yang lebih diferensial dan afirmatif.

### **Disjungsi antara Tuntutan Kurikulum Baru dan Model Pengembangan Guru yang Konvensional**

Temuan kedua mengenai manifestasi tantangan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian mengindikasikan adanya disjungsi mendasar antara tuntutan Kurikulum Merdeka dan model pengembangan kapasitas guru yang masih berlaku. Kurikulum ini menuntut guru untuk memiliki kompetensi tingkat tinggi, seperti *design thinking* dalam menyusun modul ajar, kemampuan fasilitasi kompleks dalam PjBL, dan keterampilan asesmen autentik (Erhy Ragil Nazar et al., 2024; Marwiyah et al., 2024). Namun, model pelatihan yang masih dominan bersifat *cascade training*, teoritis, dan berjangka pendek terbukti tidak memadai untuk membangun kompetensi semacam itu (Sucipto et al., 2024).

Teori pembelajaran profesional kontemporer, khususnya konsep *job-embedded professional development* (Darling-Hammond et al., 2017), menawarkan perspektif korektif. Pembelajaran yang efektif bagi guru harus bersifat kontekstual, kolaboratif, dan berkelanjutan, terjadi dalam komunitas praktik di sekolahnya sendiri. Temuan mengenai efektivitas penguatan *growth mindset* (Sri Sugiarto et al., 2022) dan kolaborasi dalam KKG (Puspitri Mayangsari et al., 2024) mendukung pandangan ini. Oleh karena itu, rekomendasi untuk mentransformasi model pelatihan menuju pendampingan (*coaching*) dan *lesson study* yang intensif bukan hanya solusi praktis, tetapi sebuah keharusan teoritis. Transformasi ini sejalan dengan konsep guru sebagai *reflective practitioner* (Schön, 1983) yang terus menerus belajar dan beradaptasi berdasarkan pengalaman nyata di kelasnya.

### **Kepemimpinan Instruksional dan Ekosistem Kolaboratif sebagai Faktor Pemoderasi**

Temuan ketiga mengenai faktor sistemik, khususnya peran kepemimpinan dan jejaring kolaborasi, memperoleh dukungan teoritis yang kuat dari penelitian tentang kepemimpinan pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional tidak hanya berperan sebagai manajer, tetapi lebih sebagai pembina pembelajaran yang mampu menciptakan kondisi bagi tumbuhnya kapasitas kolektif guru (Leithwood et al., 2020). Studi Adha dan Fadhila (2023) serta Kasmawati et al. (2025) menunjukkan bahwa kepemimpinan yang adaptif dan transformasional menjadi faktor penentu dalam mengatasi tantangan implementasi. Di sisi lain, lemahnya kolaborasi dengan orang tua dan komunitas (Israwati Amir et al., 2022) mencerminkan masih terbatasnya pemahaman

tentang sekolah sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang lebih luas (*ecological systems theory*, Bronfenbrenner, 1979). Kurikulum yang menekankan relevansi dengan kehidupan nyata akan sulit terwujud tanpa dukungan dan keterlibatan aktif dari mikrosistem dan mesosistem di sekitar anak.

### **Menuju Model Implementasi yang Adaptif dan Berbasis Bukti**

Sintesis rekomendasi keempat dan kelima, mengenai perlunya *feedback loop* dan evaluasi kebijakan yang partisipatif, menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dalam siklus kebijakan pendidikan. Selama ini, evaluasi kurikulum cenderung bersifat sumatif dan *top down*. Temuan dari tinjauan literatur ini justru menyerukan pendekatan formatif dan partisipatif yang melibatkan guru sebagai mitra evaluasi. Pendekatan ini selaras dengan konsep *adaptive implementation* dalam ilmu kebijakan publik, yang mengakui bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu belajar dan beradaptasi dari umpan balik pelaksana di lapangan (Sanderson, 2009). Institusionalisasi mekanisme *feedback loop* yang terstruktur, seperti yang diusulkan Sucipto et al. (2024), bukan hanya akan membuat kebijakan lebih responsif, tetapi juga memberdayakan guru sebagai agen pengetahuan yang kontributif terhadap perbaikan kebijakan.

### **Implikasi Teoritis, Praktis, dan Agenda Penelitian Lanjutan**

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi. Secara teoritis, penelitian memperkuat kebutuhan untuk mengintegrasikan perspektif *street level bureaucracy* dan *ecological systems theory* dalam menganalisis reformasi kurikulum, karena tantangan muncul dan harus diatasi pada berbagai level sistem yang saling berhubungan.

Secara praktis, implikasi utama adalah bahwa intervensi harus bersifat sistemik dan simultan. Peningkatan kapasitas guru harus dibarengi dengan rasionalisasi beban administratif melalui digitalisasi, pemerataan infrastruktur melalui kebijakan afirmatif, dan penguatan kepemimpinan instruksional. Program seperti Platform Merdeka Mengajar memiliki potensi besar jika tidak hanya sebagai repositori, tetapi juga sebagai alat untuk membangun komunitas belajar dan menyederhanakan pekerjaan administratif guru.

Adapun agenda penelitian mendatang, temuan ini mengungkap beberapa celah penting. Pertama, diperlukan penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi model pendampingan (*coaching*) dan PLC mana yang paling efektif dalam konteks geografis dan sosial ekonomi yang berbeda di Indonesia. Kedua, penelitian tentang dampak Kurikulum Merdeka terhadap hasil belajar (*learning outcomes*) siswa, khususnya dalam dimensi keterampilan abad ke-21 dan Profil Pelajar Pancasila, masih sangat terbatas dan perlu segera dilakukan. Ketiga, kajian komparatif tentang kebijakan

afirmatif dalam distribusi sumber daya pendidikan dapat memberikan pelajaran berharga untuk mempersempit kesenjangan implementasi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review (SLR)* terhadap 18 artikel ilmiah terkini, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang Sekolah Dasar di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang bersifat kompleks, multi-level, dan saling terkait. Temuan utama penelitian ini mengidentifikasi lima tema tantangan dominan yang secara konsisten melintas di berbagai konteks studi, yaitu: (1) keterbatasan kompetensi dan kesiapan guru, (2) beban administratif dan kerumitan perencanaan, (3) kesenjangan infrastruktur dan sumber daya, (4) kompleksitas sistem penilaian, serta (5) dinamika kontekstual peserta didik dan dukungan orang tua.

Kelima tema ini tidak berdiri sendiri. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa tantangan-tantangan tersebut termanifestasi secara nyata dalam kesulitan teknis pada siklus pembelajaran, mulai dari perencanaan (penyusunan modul ajar dan ATP yang tidak optimal), pelaksanaan (penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis proyek yang terhambat), hingga penilaian (kesulitan merancang asesmen autentik). Lebih jauh lagi, akar dari permasalahan ini bersifat sistemik, bukan semata-mata beban individu guru. Faktor-faktor seperti model pengembangan profesi guru yang belum efektif, kebijakan yang kurang kontekstual, disparitas alokasi sumber daya yang tidak merata, serta lemahnya kepemimpinan instruksional dan ekosistem kolaborasi menjadi determinan struktural yang memperparah hambatan di lapangan.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa upaya mengatasi tantangan implementasi tidak cukup hanya dengan intervensi parsial pada level guru. Keberhasilan Kurikulum Merdeka secara substansial memerlukan intervensi sistemik yang terintegrasi dan berkelanjutan. Intervensi ini harus mencakup transformasi model pengembangan guru yang berbasis praktik kolaboratif, pemerataan sumber daya yang berkeadilan bagi sekolah di daerah 3T, penguatan peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, serta institusionalisasi mekanisme umpan balik partisipatif untuk memastikan kebijakan terus adaptif dan responsif terhadap dinamika di lapangan. Tanpa pendekatan sistemik ini, esensi Kurikulum Merdeka untuk menciptakan pembelajaran yang fleksibel, inklusif, dan bermakna akan sulit terwujud secara optimal.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Adha, W. A., & Fadhila, S. (2023). Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Ibtida: Jurnal Kajian Pendidikan Dasar*, 3(1), 69-78.
- Alwi, D., & Achadi, A. (2024). Tantangan Implementasi Kurikulum Di Era Digital: Kesiapan Guru Dan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Informasi*, 12(2), 115-128.
- Angga, dkk. (2022). Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5877-5889.
- Ariyanti, Y. P., Hazin, M., & Supriyanto. (2024). Evaluasi Kebijakan kurikulum Merdeka. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(1), 23-29.
- Arjuni, M., & Aristiati, F. (2024). Kendala-Kendala Implementasi Kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 10(3), 45-58.
- Ariesanti, A., Mudiono, A., & Arifin, M. (2023). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 8(1), 23-35.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development*. Harvard University Press.
- Darling-Hammond, L., et al. (2017). *Empowered Educators: How High-Performing Systems Shape Teaching Quality Around the World*. Jossey-Bass.
- Dewi, M., dkk. (2025). Tantangan Implementasi Kurikulum Di Era Digital: Kesiapan Guru Dan Infrastruktur. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 13(1), 78-92.
- Erhy Ragil Nazar, dkk. (2024). Peluang dan Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar: Sebuah Studi Interview di Sekolah Penggerak dan Mandiri Berubah. *Jurnal Pendidikan Inovatif*, 11(2), 134-148.
- Hasballah, & Zulfatmi. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka: Tantangan, Kebijakan, Dan Dampak Terhadap Pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(1), 56-71.
- Inayati, I. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 8(3), 112-125.
- Israwati Amir, dkk. (2022). Tantangan Implementasi nilai-Nilai Profil Pelajar Pancasila dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*, 14(2), 189-203.
- Kasmawati, dkk. (2025). Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Optimalisasi Sumberdaya Manusia dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(1), 45-58.
- Kemendikbudristek. (2023). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. Keele University.
- Kurniawan, A. T., dkk. (2024). Pengembangan Pendidikan Anak SD dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(2), 89-102.
- Leithwood, K., et al. (2020). *How Successful Leadership Influences Student Learning: The Second Edition of the School Leadership and Management Series*. Routledge.
- Lipsky, M. (2010). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Marwiyah, dkk. (2024). Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kelas V B SDN 34/1 Teratai. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 9(3), 156-169.
- Marzuqi, M., & Ahid, A. (2023). Transformasi Kurikulum di Indonesia: Dari Kurikulum 2013 hingga Kurikulum Merdeka. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 8(2), 67-79.

- Muzharifah, dkk. (2023). Persepsi Guru Terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah Walisongo Kranji 01 Kedungwuni. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(4), 234-248.
- Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.
- Popay, J., et al. (2006). Guidance on the conduct of narrative synthesis in systematic reviews. *ESRC Methods Programme*.
- Purwulan, P. (2024). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 10(1), 78-92.
- Puspitri Mayangsari, dkk. (2024). Analisis Permasalahan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 9(2), 123-138.
- Rahayu, R., dkk. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6313-6319.
- Ruliandari, L., dkk. (2025). Analisis Tantangan dan Strategi Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran IPA di SD. *Jurnal Pendidikan Sains*, 13(1), 45-58.
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1979). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 539-560.
- Sabriadi, S., & Wakia, H. (2024). Dinamika Perubahan Kurikulum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(3), 145-160.
- Schön, D. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books.
- Sri Sugiarto, dkk. (2022). Penguatan Growth Mindset Guru dalam Persiapan Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pengembangan Profesi Guru*, 8(3), 234-248.
- Sucipto, dkk. (2024). Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Systematic Literature Review. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 9(4), 189-204.
- Syukri, S., dkk. (2025). Tantangan Guru Senior dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 11(1), 89-102.
- Van Meter, D., & Van Horn, C. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration and Society*, 6(4), 445-488.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93-112.
- Yansah, O., dkk. (2023). Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 8(2), 145-160.
- Yoshinta Putri, Mufarrihul Hazin, Y P Ariyanti, Almufi (n.d.). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(1), 23-29.